

ABSTRAK

Sengketa impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan diawali dengan ditetapkannya kebijakan importasi Indonesia yang dianggap bertentangan dengan ketentuan GATT dan menghambat ekspor produk hortikultura AS ke Indonesia. AS mengajukan sengketa ini ke panel DSB setelah konsultasi gagal menyelesaikan sengketa. Panel dan badan banding menemukan kebijakan importasi yang ditetapkan Indonesia bertentangan dengan Pasal 11 GATT mengenai larangan hambatan kuantitatif dan merekomendasikan Indonesia untuk mengubah peraturan terkait dalam jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya, AS mengajukan permohonan retaliasi terhadap Indonesia karena menganggap Indonesia belum mematuhi rekomendasi DSB. Indonesia keberatan dengan permohonan retaliasi karena, telah melakukan kepatuhan penuh terhadap rekomendasi DSB dengan melakukan penyesuaian peraturan yang digugat sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan retaliasi AS dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO, serta mengetahui kesesuaian kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang dilakukan oleh Indonesia dengan rekomendasi DSB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa permohonan retaliasi AS belum sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena berdasarkan Pasal 21.5 DSU apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai konsistensi antara perjanjian yang terkait dengan tindakan untuk melaksanakan rekomendasi DSB, maka harus dibentuk panel kepatuhan. Selain itu, Pasal 23 DSU melarang anggota WTO untuk memutuskan secara sepihak apakah suatu tindakan tidak konsisten dengan perjanjian WTO. Sedangkan, penyesuaian kebijakan importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang telah dilakukan Indonesia, telah sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB karena, dalam peraturan yang telah diubah dan disahkan sudah tidak ditemukan kebijakan yang bertentangan dengan GATT.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, Indonesia vs Amerika Serikat

ABSTRACT

Disputes on the import of horticultural products, animals, and animal products begin with the stipulation of an Indonesian import policy, which is deemed to be contrary to the GATT provisions and hinders the export of US horticultural products to Indonesia. The US submitted the dispute to the DSB panel after consultations failed to resolve it. The panel and the appeals body found Indonesia's import policy to be contrary to Article 11 of the GATT regarding the prohibition of quantitative barriers and recommended that Indonesia amend the relevant regulations within the agreed timeframe. Furthermore, the US submitted a request for retaliation against Indonesia because it considered that Indonesia had not complied with the DSB's recommendations. Indonesia objected to the request for retaliation because it had fully complied with the DSB's recommendations by making adjustments to the regulations being sued before the agreed time period expired. This research aims to determine the suitability of the US retaliation application with the dispute resolution mechanism in the WTO and to determine the suitability of the import policy of horticultural products, animals, and animal products carried out by Indonesia with DSB recommendations. The research method used is a normative juridical approach. The results showed that the US retaliation application was not in accordance with the WTO dispute resolution mechanism because, based on Article 21.5 of the DSU, if there was a disagreement regarding the consistency between the agreements related to actions to implement the DSB recommendations, a compliance panel had to be formed. In addition, Article 23 of the DSU prohibits WTO members from deciding unilaterally whether an action is inconsistent with a WTO agreement. Meanwhile, the adjustment of the policy on importing horticultural products, animals, and animal products that has been carried out by Indonesia is in accordance with the decisions and recommendations of the DSB because, in the regulations that have been amended and ratified, there are no measures that contradict the GATT.

Keywords: *Dispute Resolution, Horticultural Products, Animals and Animal Products, Indonesia vs United States*